

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dilaksanakannya pemilihan presiden (Pilpres) periode 2024-2029 telah menjadikan topik teratas pada media massa baik modern maupun konvensional yang dipenuhi dengan pemberitaan Pemilihan Umum 2024. Ketiga calon presiden telah menyelesaikan masa kampanye yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2024 hingga 10 Februari 2024, termasuk di dalamnya Anies Baswedan. Beliau dikandidatkan menjadi salah satu calon presiden nomor urut 1 bersama pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar atau yang dikenal sebagai Cak Imin.

Anies Baswedan Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. adalah seorang akademisi sekaligus mantan dari gubernur kota DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies Baswedan pada masa jabatannya dikenal sebagai yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program yang diusungnya namun, tidak sedikit juga pekerjaan maupun perlakuan beliau yang dikritisi oleh masyarakat maupun politisi.

Studi dari Halim mengatakan, sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan aktor politik yang jeli mengomunikasikan dirinya dari berbagai sisi dan tidak jarang apa yang dilakukannya menjadi satu kontroversi tersendiri dalam perpolitikan Indonesia. (Indra & Wahid, 2021).

Keresahan dan kontroversi masyarakat atas Anies Baswedan yang paling banyak dikenal adalah bahwa beliau merupakan sosok yang lekat dengan label politik identitas. Beliau dinilai menjual politik identitas agama sebagai penarik suara pada masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) periode 2017-2022 dan hingga kini label tersebut masih digemari media sebagai bahan pemberitaan Anies Baswedan.

Politik identitas adalah pembentukan identitas yang dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial yang melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Proses terjadinya

politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukanto, 2010).

Harold D. Laswell mengartikan politik identitas adalah sebuah cara untuk menarik dukungan masyarakat melalui ikatan simbol primordial (agama, suku, ras dan kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (Rozi et al., 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa politik identitas berawal dari kesamaan dalam hal-hal primordial sehingga membuat ikatannya semakin kuat antara satu dengan yang lain.

Ahli lainnya seperti Josep Klien mengartikan politik identitas adalah sebuah perlakuan kecenderungan orang-orang yang berasal dari ras, agama, suku, jenis kelamin atau etnis tertentu yang sama dalam mengatur kepentingan politik mereka semata-mata hanya untuk kepentingan bagi kelompok yang memiliki kesamaan tanpa memedulikan kelompok lainnya (Bakry, 2020).

Label politik identitas yang disematkan pada Anies Baswedan, bermula saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 untuk periode 2017-2022 berlangsung. Anies dinilai menggerakkan umat Muslim sebagai politik identitas untuk mendukung kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada 2017. Terdapat tiga kandidat pada masa pilkada periode 2017-2022, pasangan pertama adalah Agus Yudhoyono dan wakilnya Sylviana, pasangan urutan nomor dua adalah Basuki Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful sebagai wakilnya dan terakhir pasangan nomor urut ke tiga, yaitu Anies Baswedan dan Sandaga Uno sebagai wakil (Idzam et al., 2020).

Pilkada 2017 berlangsung dengan adanya dua putaran karena pemilihan pertama belum ada pasangan yang mencapai angka suara dengan kemenangan mutlak (50%+1). Pada putaran kedua pasangan yang bersaing ialah nomor urut 2 dan 3 yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor 3 dengan angka suara terakhir 57,96% (Fadhlan & Azizah, 2022)

Berdasarkan pendapat O. Romli (2023) Pilkada yang terjadi pada 2017 lalu berlangsung dengan banyaknya isu-isu kontroversi yang terjadi seperti, isu politik identitas, penggelapan uang dan kampanye hitam. Masing-masing calon memainkan isu politik identitas pada masa kampanyenya, salah satunya adalah pernyataan kontroversial Ahok yang diduga menistakan agama Islam saat ia hadir di Kepulauan Seribu 27 September 2016. Peristiwa Ahok yang menistakan agama Islam ini melatarbelakangi terjadinya aksi massa pembelaan ayat suci kitab al-Quran dengan berbagai jilid salah satunya adalah aksi 212 yang dilaksanakan di Monumen Nasional, gerakan ini dipelopori oleh sebuah kelompok yang disebut Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Dalam (O. Romli & Nurlia, 2023) Gerakan aksi 212 disebut-sebut sebagai gerakan bersatunya umat muslim dalam membela Islam yang saat itu bertepatan dengan hari Pilkada, Ahok yang memiliki suara tertinggi pada putaran pertama dengan angka suara 42, 96% mengalami penurunan pada putaran kedua dengan angka 42, 05% terdapat selisih angka hingga 15% dengan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga. Penurunan suara Ahok dinilai karena umat muslim yang merasa dinistakan agamanya oleh beliau, dengan itu Anies Baswedan menjabat sebagai Kepala Daerah Jakarta pada saat itu, pada sisi lain umat non-muslim yang membela Ahok merasa bahwa Anies Baswedan menunggangi aksi 212 sebagai ajang penarikan suara agar beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menikmati hasil dari kesengsaraan Ahok yang saat itu terjerat pasal dan masuk penjara akibat skandal penistaan agama yang dilakukannya, label politik identitas yang disematkan ke Anies Baswedan masih terus melekat hingga saat ini meskipun beliau tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut pendapat Taufik & Pratiwi (2021) Penggunaan Politik Identitas tidak hanya melabeli aktor politik yang berada di Indonesia, Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat juga dinilai menggunakan politik identitas untuk meraih suara pada pemilihan presiden tahun 2016 silam. Banyak pidato trump yang dinilai mengandung unsur kekerasan dan

rasisme. Kedudukan Trump menjadi presiden sangat memberikan banyak tanda tanya masyarakatnya karena semua yang dijalankan Trump justru berbalik dengan tujuan Amerika Serikat, yaitu sebagai “*an epitome of freedom and equality*” dengan Trump mengusung politik identitas bernuansa *anti-immigrant* dan supremasi kulit putih terlihat dari kebijakan yang Trump buat, yaitu kebijakan *anti-immigrant* dan kebijakan anti-muslim.

Sesuai dengan yang Trump katakan dan disetujui oleh pendukungnya bahwa imigran yang datang ke Amerika Serikat dinilai sebagai pengganggu yang ke depannya dapat mengambil alih lapangan pekerjaan yang ada di AS dan berdampak pada meningkatnya pengangguran di kalangan warga asli Amerika Serikat dengan itu, dibuat kebijakan *anti-immigrant* untuk menurunkan dan mencegah angka pengangguran warga negara Amerika Serikat. Kemudian, lahirnya kebijakan rasis Donald Trump juga merupakan sebuah respon atas kebijakan yang dibuat oleh presiden sebelumnya, Barack Obama, yang memasukkan imigran asal Suriah sebanyak 12.000 orang selama tahun 2015 (Yuliantoro et al., 2017). Kebijakan anti-muslim yang Trump usung berlangsung dengan isu Islam Radikal yang dipercayainya. Trump cenderung vokal terhadap isu label radikal pada umat muslim, Trump bahkan berjanji untuk melarang para imigran atau pendatang muslim untuk masuk ke Amerika Serikat sebagai pencegahan atas terorisme (Russell Berman, 2015).

Politik identitas sebagai isu yang terus-menerus digaungkan pada masa pemilihan memiliki daya tarik sendiri untuk dibahas karena khususnya negara Indonesia memiliki jenis masyarakat yang multikultural sehingga kehidupan masyarakat dipenuhi oleh perbedaan baik dari segi agama, ras, suku, etnis dll sehingga isu politik identitas sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian politik identitas juga berpotensi memunculkan perdebatan bahkan perpecahan dan menjadikannya sebagai tantangan bagi demokrasi pada masyarakat karena hanya mementingkan kepentingan suatu kelompok dan mengabaikan kelompok yang berbeda.

Politik identitas juga berdampak signifikan pada masyarakat karena memengaruhi aspek politik dan masyarakat, seperti pemilihan umum, kebijakan politik, hubungan sosial antar masyarakat, dll.

Pemberitaan terkait Anies Baswedan dan label politik identitas agama berperan penting bagi dirinya dalam pemilihan calon presiden. Salah satu dampak yang terjadi adalah ketakutan kaum minoritas untuk memilih Anies Baswedan sebagai presiden pada periode selanjutnya, kekhawatiran minoritas akan didiskriminasikan oleh pemimpin negara menjadikan alasan terbesarnya.

Berdasarkan Arifin (2010) Media digital memiliki peran penting dalam konstruksi opini dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah opini mengenai label politik identitas Anies Baswedan pada masa Pemilihan Umum calon presiden 2024, media daring menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat dalam masa Pemilihan Umum. Media daring memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi, masyarakat mengandalkan media daring untuk mengenal kandidat, partai politik, serta platform dan visi misi mereka. Melalui berita, artikel, video, dan infografik, media daring menyajikan berbagai isu kampanye dan memudahkan masyarakat memahaminya. Keunggulan media daring terletak pada kemudahan dan keluasan akses, sehingga siapapun dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah, kemudian media massa dapat membentuk opini publik, termasuk terkait politik identitas.

Framing, sebagai teknik penyajian informasi, dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap suatu isu. Dampak dari komunikasi massa sangatlah kompleks, salah satunya adalah pembentukan opini publik. Media massa daring bisa memanfaatkan teknik ini untuk mempromosikan agenda tertentu atau mendukung kandidat tertentu, sehingga berpotensi memicu bias dan mempengaruhi opini publik. Opini publik pada dasarnya adalah pendapat rata-rata individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi yang telah disebutkan tadi, untuk memecahkan sebuah persoalan, terutama

yang beredar di media massa. Oleh sebab itu, opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa (Arifin, 2010).

Sejalan dengan penjelasan sisi kontra dari politik identitas, agama Islam-pun telah mengingatkan ummatnya untuk selalu menjadi pemimpin yang adil bagi rakyatnya, semua ummat harus diperlakukan dengan adil, tanpa membeda-bedakan agama, asal dan lain lain. Sesuai dalil al-Quran QS. an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. an-Nisa ayat 58).

Salah satu teori mengenai media massa mampu membentuk opini publik adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh McComb dan Donald L. Shaw menyatakan bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk memengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media menganggap isu itu penting juga (Griffin, 2003). Kepentingan masing-masing media dalam memilih sentimen pemberitaan pada suatu tokoh tentu berbeda-beda tergantung pada kepentingannya masing-masing media karena itu banyak media yang menjadikan publikasi beritanya semata atas kepentingan pribadi dan meninggalkan aturan-aturan jurnalistik yang telah ditetapkan.

Dilansir dari survei yang dilakukan oleh IPWS yang melakukan wawancara daring dengan survei kuesioner pada periode 26 Juni 2023 hingga 2 Juli 2023 dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 1.429 responden yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia dengan metodologi yang digunakan adalah on-probability sampling (incidental sampling) dan margin of error  $\pm 2,90\%$  menghasilkan bahwa kategori media daring yang paling sering diakses pada ajang Pemilihan Umum Calon Presiden 2024

oleh Masyarakat adalah Kompas dengan persenan sebanyak 30,36% (Mantalean & Meiliana, 2023). Kompas menjadi salah satu media yang paling banyak diakses oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 dengan itu penting bagi Kompas untuk menjaga netralitas dengan tidak menjatuhkan salah satu kandidat yang nantinya menggiring opini negatif di masyarakat dan terdapat “*bias*” pada salah satu kandidat.

Dilansir dari website resmi Medcom.id, PT Citra Multimedia Indonesia atau yang dikenal singkat sebagai Medcom.id merupakan media yang hanya menyediakan layanannya berbasis daring. Medcom.id diluncurkan pada tanggal 25 November 2017, Medcom.id merupakan salah satu bagian dari media group, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang media massa, iklan, properti, dll. Medcom.id dalam eksistensinya memiliki tujuan untuk menghadirkan “jurnalisme lama”, yaitu jurnalisme yang mencari kebenaran dan menyajikannya kepada pembaca dengan mengedepankan skeptisisme, verifikasi ulang, serta memperkuat nilai-nilai dasar etika jurnalistik .

Pimpinan Utama dari Medcom.id diduduki oleh Drs. H. Surya Dharma Paloh sebagaimana pimpinan dalam Media Group, selain menjadi pimpinan utama Media Group kini Surya Paloh mengemban tugasnya sebagai ketua umum partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai Nasdem dalam Pemilihan Umum 2024 mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden yang akan didukungnya dan dideklarasikan pada tanggal 3 Oktober 2022. Dikutip dari media Kompas.com yang berjudul “Surya Paloh Ungkap Alasan Usung Anies Baswedan Jadi Capres: *"Why Not the Best?"*” Surya Paloh mengungkapkan putusan Nasdem mendukung Anies Baswedan dikarenakan Anies Baswedan merupakan kandidat yang menurutnya terbaik (Dirgantara & Farisa, 2022).

Fenomena dukungan Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem kepada Anies Baswedan tentunya sangat bertolak belakang jika penerapannya dilakukan oleh Surya Paloh sebagai Pimpinan Utama Media

Group, yang mana tujuan utama dari Medcom.id adalah menjaga objektivitasnya sebagai media massa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Politik Identitas Anies Baswedan dalam Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 Pada Media Kompas.com dan Medcom.id untuk meneliti bagaimana kedua media mengkonstruksi pemberitaan politik identitas Anies Baswedan pada masa Pemilihan Umum 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana framing media daring (Kompas.com dan Medcom.id) terhadap label politik identitas Anies Baswedan dalam masa pemilihan umum calon presiden 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengkaji serta menginformasikan kepada pembaca tentang politik identitas Anies Baswedan pada Pemilihan Umum Calon Presiden 2024 yang dikonstruksikan oleh media daring Kompas.com dan Medcom.id.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk mempelajari teori analisis framing yang digunakan pada suatu objek penelitian serta menjadi informasi terkait label politik identitas Anies Baswedan berdasarkan framing yang dikonstruksikan oleh media.

### 2. Praktis

Secara praktis, penulis berharap agar penelitian dapat menjadi pembelajaran bagi media massa daring dalam membangun opini yang objektif sebagaimana peraturan pers yang berlaku.